



Policy Brief #3

Sustainable Development and Energy Transition in Indonesia

Pendahuluan

SUDRAJAT NUR FARIZI

Indonesia dihadapkan pada pilihan besar: apakah kita akan mengabaikan peringatan alam yang jelas dan menunda mengatasi masalah besar dengan biaya yang cukup tinggi, ataukah kita akan mempercepat pelaksanaan berbagai pekerjaan rumah yang telah lama tertunda demi meraih manfaat jangka panjang.

Pada tahun 2009, Presiden Megawati menggelar rapat kabinet bawah air pertama di dunia menggunakan peralatan scuba untuk menyoroti fakta bahwa dalam beberapa dekade mendatang, sebagian besar wilayah negara tersebut akan tenggelam jika permukaan laut terus naik akibat mencairnya gunung es di kutub. Beberapa negara di Pasifik, termasuk Megawati, bahkan telah merencanakan untuk memindahkan penduduk mereka ke negara lain.

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan banyak pulau besar dan wilayah pegunungan, juga menghadapi ancaman serupa.

Simulasi menunjukkan bahwa selain pulau-pulau kecil, banyak wilayah pesisir seperti pantai utara Jawa, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan akan terendam jika permukaan laut naik lima meter pada tahun 2050. Menurut riset Kompas 2021, sekitar 199 kota dengan luas 118.000 hektar akan terdampak banjir rob musiman pada tahun tersebut, mengancam 8,6 juta orang dan menyebabkan kerugian ekonomi sebesar Rp 1,576 triliun.

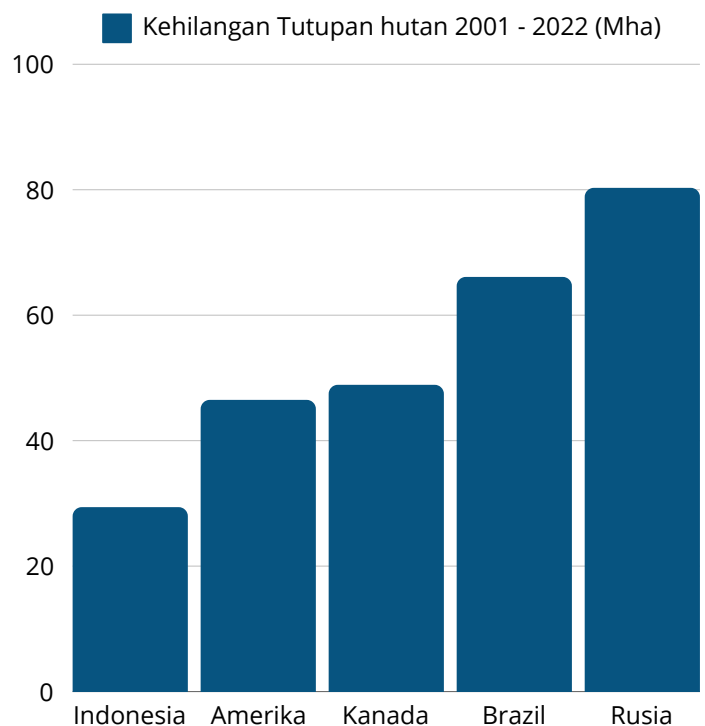
Indonesia dalam Transisi Energi dan Pembangunan Berkelanjutan

Indonesia tidak hanya diamanatkan untuk berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, tetapi juga memiliki tanggung jawab, bahkan kewajiban, untuk melindungi warganya dengan melakukan tindakan mitigasi perubahan iklim, mengurangi emisi, dan menjalani transisi menuju pembangunan yang berkelanjutan (yang juga dikenal dengan sebutan ekonomi rendah karbon atau ekonomi hijau).

Anak-anak saat ini akan menghadapi dampak paling besar dari perubahan iklim dan masalah lingkungan, seperti kesulitan akses air bersih, penurunan hasil pertanian, dan meningkatnya bencana alam, sementara pada tahun 2022, Indonesia tercatat sebagai penghasil karbon terbesar kelima, setelah Amerika Serikat, Tiongkok, India, dan Rusia, dan yang mengkhawatirkan, meskipun negara-negara maju menunjukkan tren penurunan emisi, Indonesia bersama Tiongkok dan India justru mengalami tren peningkatan.

Global Forest Watch melaporkan bahwa antara 2001 hingga 2022, Indonesia kehilangan 29,4 juta hektar hutan primer, menempatkan negara ini pada urutan kelima dalam hal deforestasi terbanyak setelah Rusia, Brasil, Kanada, dan Amerika Serikat.

Selama masyarakat terus memperoleh manfaat lebih besar dari penebangan hutan untuk kayu dan konversi kawasan hutan menjadi perkebunan, pertanian, dan perumahan, maka mengurangi deforestasi menjadi sangat sulit. Oleh karena itu, insentif perlu diberikan agar masyarakat memperoleh keuntungan finansial yang lebih besar dari upaya melindungi hutan.



Sumber : Global Forest Watch
(www.globalforestwatch.org)

KTTH Iklim PBB ke-28 di Doha (COP 28) mengajak semua pihak untuk berkontribusi dalam upaya global mengatasi perubahan iklim, termasuk "transisi dari bahan bakar fosil ke sistem energi yang lebih berkelanjutan secara adil, teratur, dan merata, serta mempercepat tindakan dalam dekade krisis ini untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050 sesuai dengan temuan ilmiah." Sebagai salah satu pihak yang menandatangani kesepakatan tersebut, Indonesia perlu menunjukkan kemajuan yang signifikan dan tetap berkomitmen untuk mengatasi krisis iklim.

Rancangan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2025-2045 yang sedang dibahas di DPR menargetkan Indonesia untuk menjadi negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan pada tahun 2045. Pemerintah tidak boleh terjebak dalam pilihan seakan-akan harus memilih antara ekonomi atau lingkungan. Sebaliknya, kesejahteraan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia tidak akan tercapai tanpa adanya perlindungan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Rekomendasi

Pertama, meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal tanpa menebang hutan, dengan memanfaatkan hasil hutan non-kayu seperti madu, rotan, dan obat-obatan tradisional, serta mengembangkan pariwisata berkelanjutan sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat setempat dengan dukungan pemerintah daerah, selain itu juga mengimplementasikan skema pembayaran jasa ekosistem, di mana masyarakat yang menerima manfaat dari jasa lingkungan memberikan kompensasi finansial kepada mereka yang berperan dalam pemeliharannya.

Kedua, Indonesia perlu mengimplementasikan kesepakatan COP 28 untuk mengurangi ketergantungan pada listrik yang berasal dari fosil dengan meningkatkan tarif pengadaan energi terbarukan (FIT), sambil menghentikan pembangkit listrik berbasis batu bara yang menghasilkan emisi tinggi dan polutan berbahaya, dengan dukungan internasional seperti Just Energy Transition Program (JETP) dan pendanaan dari pasar, seperti obligasi ramah lingkungan (Green and Sustainable Bonds). Tidak ada ruang lagi untuk penambahan pembangkit listrik tenaga batu bara.

Ketiga, pembangunan berkelanjutan harus kembali menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia mengajarkan rasa hormat terhadap lingkungan dan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Kita perlu mempelajari kembali kebijaksanaan yang hampir hilang ini dan mengintegrasikannya ke dalam sistem perekonomian Indonesia. Penelitian oleh J.J. Meijer et al. (2021) menempatkan Indonesia sebagai pencemar laut terbesar kelima setelah Filipina, India, Tiongkok, dan Malaysia. Prinsip ekonomi sirkular dan ESG (Environment, Social & Governance) harus menjadi dasar pembangunan Indonesia untuk mengurangi limbah hasil produksi yang sering berakhir sebagai tumpukan sampah di darat atau laut. Sektor usaha perlu menerapkan Extended Producer Responsibility (EPR), di mana perusahaan tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga merencanakan serta melaksanakan pengumpulan dan daur ulang limbah sebagai bagian dari prosedur operasi standar.

Keempat, pandangan anak-anak kita perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan mengenai pembangunan dan investasi yang berdampak pada lingkungan dan iklim. Pada COP 28 di Dubai, di antara seratus delegasi pemuda, terdapat Erwin Mahendra Eka Saputra (22) dan Nasywa Adivia Wardana (16) yang menyuarakan keprihatinan mereka terhadap masalah yang terus berlanjut,

yang mempengaruhi layanan publik penting bagi anak-anak, terutama jika bencana terkait iklim seperti kebakaran hutan dan banjir besar semakin meningkat. Generasi penerus bangsa berhak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan mitigasi krisis iklim.

Penutup

Indonesia terdampak secara signifikan oleh krisis iklim. Kenaikan permukaan laut akan mempengaruhi kehidupan jutaan penduduk pesisir, sementara kekeringan dan bencana alam akan merugikan jutaan petani. Sulit untuk membayangkan kemakmuran Indonesia tanpa tindakan iklim yang memadai. Global Action Tracker pada 2023 menilai bahwa Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia masih sangat kurang (Critically Insufficient), sehingga jika tidak ada perubahan, hal ini akan memperburuk pemanasan global. Pemerintah Indonesia periode 2024-2029 perlu bergerak cepat untuk mempercepat transisi menuju pembangunan berkelanjutan, dengan energi terbarukan sebagai bagian penting dari strategi tersebut. *Let's leave a better Indonesia for our children.*

Daftar Bacaan

1. Global Forest Watch. (2023). Deforestation in Indonesia: 2001-2022. Retrieved from <https://www.globalforestwatch.org>
2. UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). (2023). COP 28 and Global Climate Action. Retrieved from <https://unfccc.int>
3. Indonesia Ministry of Environment and Forestry. (2022). Indonesia's Nationally Determined Contribution (NDC) and Climate Actions. Jakarta: Ministry of Environment and Forestry.
4. Meijer, J. J., et al. (2021). Indonesia's Impact on Marine Pollution and the Path Forward. *Journal of Environmental Studies*, 45(3), 234-249.
5. World Bank. (2022). Climate Change and Indonesia: Vulnerabilities and Mitigation Strategies. World Bank Report. Retrieved from <https://www.worldbank.org>
6. Kompas. (2021). Banjir Rob dan Kerugian Ekonomi di Indonesia pada 2050. Kompas. Retrieved from <https://www.kompas.com>
7. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). (2021). Sixth Assessment Report: The Physical Science Basis. Retrieved from <https://www.ipcc.ch>
8. Sustainable Development Goals Report. (2022). Sustainable Development in Indonesia: Challenges and Opportunities. United Nations.
9. Kementerian PPN/Bappenas. (2021). Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2025-2045. Jakarta: Bappenas.
10. Sustainable Energy for All. (2022). Renewable Energy and Indonesia's Transition to a Low-Carbon Economy. Retrieved from <https://www.seforall.org>
11. The Global Carbon Budget. (2023). Global Carbon Emissions and their Impact on Climate Change. Retrieved from <https://www.globalcarbonproject.org>
12. Indonesia Climate Change Trust Fund. (2020). Indonesia's Climate Mitigation and Adaptation Policies. Jakarta: ICCCF.